



DEPTAN

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG SOSIAL EKONOMI PERTANIAN



LIPI

AKSELARASI PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN: REVITALISASI PERAN SEKTOR PERTANIAN

Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto

369.011.4

SUD

a



**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
Bogor, 11 Agustus 2009**

369.011.4

SUD

a



DEPTAN

**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**



LIPI

AKSELERASI PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN: REVITALISASI PERAN SEKTOR PERTANIAN

Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
Bogor, 11 Agustus 2009

© Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2009

ISBN: 978-602-8218-31-3

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan: Revitalisasi
Peran Sektor Pertanian/Sudaryanto, T.

ii+52 hlm; 14,5 x 20,2 cm

ISBN 978-602-8218-31-3

1. Pertanian 2. Pengentasan kemiskinan 3. Revitalisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jln. Ragunan 29 Pasarminggu, Jakarta Selatan

Telp. : 021-7806202

Faks. : 021-7800644

E-mail : kabadan@litbang.deptan.go.id

PRAKATA PENGUKUHAN

Assalaamu'alaikum Warochmatullaahi Wabarokatuh

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang Saya Hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat-Nya kita bisa berkumpul di Auditorium ini dalam acara pengukuhan Profesor Riset Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan materi orasi yang berjudul:

AKSELERASI PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEDESAAN: REVITALISASI PERAN SEKTOR PERTANIAN

Dalam pemaparannya, orasi ini dibagi menjadi delapan bab, yaitu:

- I. Pendahuluan
- II. Dinamika Tingkat Kemiskinan
- III. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
- IV. Peranan Sektor Pertanian Dalam Pengentasan Kemiskinan
- V. Tinjauan Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan
- VI. Strategi dan Kebijakan Akselerasi Pengentasan Kemiskinan
- VII. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
- VIII. Penutup

I. PENDAHULUAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin Sekalian,

Kinerja ekonomi Indonesia secara makro tumbuh menggembirakan. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

dalam periode 2000-2008 rata-rata 5,2% per tahun (BPS, 2003; 2008; 2009a). Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi hanya satu digit dengan rata-rata 6,4% per tahun (BPS, 2003; 2008). Meskipun demikian, ekonomi Indonesia masih menyisakan masalah, terutama terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, rata-rata 9,6% dalam periode yang sama. Tingkat kemiskinan menunjukkan *trend* penurunan, tetapi penduduk miskin masih cukup banyak, sekitar 16,9% dari jumlah penduduk (BPS, 2009b).

Berdasarkan fakta tersebut maka upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran yang mencapai rata-rata Rp 44,5 trilyun per tahun dalam periode 2005-2008 (BAPPENAS, 2008).

Sekitar 65,4% penduduk miskin berada di pedesaan dan mereka umumnya bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu, pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian menjadi sangat strategis.

Fokus utama materi orasi ilmiah ini adalah dinamika kemiskinan di pedesaan serta alternatif strategi dan kebijakan dalam upaya akselerasi pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian.

II. DINAMIKA TINGKAT KEMISKINAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin Sekalian

Tingkat kemiskinan ditentukan oleh garis kemiskinan, yaitu standar hidup minimum yang dianggap layak bagi masyarakat tertentu. Penduduk yang tingkat kehidupannya di bawah standar minimum dikelompokkan sebagai penduduk miskin.

2.1. Pengukuran Tingkat Kemiskinan

Standar hidup minimum ditentukan dengan memperkirakan nilai pengeluaran untuk membeli kelompok barang pokok (makanan dan bukan makanan) yang dikonsumsi masyarakat (Raharto dan Romdiati, 2000). Tingkat kemiskinan umumnya diukur dengan Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index (Foster *et al.*, 1984) yang terdiri atas: (a) persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk (*head-count index*, P_0); (b) tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1); dan (c) tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2). Indikator tersebut telah digunakan secara luas karena: (a) relatif mudah diukur dengan data yang tersedia di setiap negara atau daerah; (b) bermanfaat untuk memonitor dan membandingkan tingkat kemiskinan antar-waktu dan antar-negara atau daerah.

Tingkat garis kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bertujuan untuk menentukan kebutuhan minimum makanan sebagai nilai pengeluaran konsumsi guna memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori/kapita/hari. Kebutuhan minimum untuk bukan makanan adalah nilai pengeluaran konsumsi guna memenuhi kebutuhan perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Pada tahun 2009, nilai garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 200.262/kapita/bulan, setara dengan US\$ 1,55/kapita/hari (BPS, 2009b). Sumbangan nilai bahan makanan dalam garis kemiskinan mencapai 73,6%, terutama beras, gula pasir, telur, mie *instant*, tahu dan tempe. Fluktuasi harga-harga kelompok pangan tersebut sangat menentukan perubahan tingkat kemiskinan. Demikian juga pengaruh cakupan dan komposisi barang konsumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut (Irawan, 2000).

Di tingkat global, Bank Dunia menentukan tingkat garis kemiskinan internasional sebesar US\$1,25/kapita/hari yang telah diperbaharui dari angka sebelumnya sebesar US\$1,08/ kapita/hari (Chen and Ravallion, 2007; 2008).

2.2. Trend Global

Jika angka garis kemiskinan ditetapkan US\$1,25/hari, jumlah penduduk miskin di dunia berkurang dari sekitar 1,9 milyar pada tahun 1981 (51,8%) menjadi 1,4 milyar (25,2%) pada tahun 2005, atau menurun 0,8%/tahun. Tingkat penurunan tersebut lebih tinggi dari target penurunan menurut *Millenium Development Goal* (MDG) sebesar 0,6%/tahun hingga 2015. Berdasarkan *trend* tersebut, sasaran MDG secara global diperkirakan dapat dicapai menjelang tahun 2015, namun jumlah penduduk miskin pada saat itu diperkirakan masih cukup besar, sekitar 800 juta orang (Chen and Ravallion, 2007; 2008).

Penurunan jumlah penduduk miskin sebagian besar terjadi di Asia Timur dan Pasifik dari 77,7% pada tahun 1981 menjadi 16,8% pada tahun 2005. Penurunan jumlah penduduk miskin di Cina lebih signifikan, yaitu dari 84% menjadi 15,9% dalam periode yang sama. Sebaliknya di Sub-Saharan Afrika, jumlah penduduk miskin naik dari 53,7% pada tahun 1981 menjadi 58,2% pada tahun 1999, walaupun setelah itu turun ke angka 51,2% pada tahun 2005. Di Asia Selatan, penurunan jumlah penduduk miskin juga relatif lambat, yaitu dari 59,4% pada tahun 1981 menjadi 40,3% pada tahun 2005 (Chen and Ravallion, 2008).

Variasi penurunan tingkat kemiskinan antar-kawasan dan antar-negara dapat dijelaskan oleh faktor: (a) perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi; (b) perbedaan tingkat distribusi pendapatan; dan (c) perangkap kemiskinan geografis (Ravallion, 2007).

2.3. Trend Nasional

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam periode 1976-1996 menurun drastis, yaitu dari 54,2 juta (40,1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta (11,3%) pada tahun 1996. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 37,2 juta orang (16,6%), tetapi pada tahun 2009 turun menjadi 32,5 juta orang (14,2%).

Indeks kedalaman kemiskinan berfluktuasi, namun selama enam tahun terakhir cenderung turun dari 3,07 pada tahun 1992/1993 menjadi 2,64 pada tahun 2008/2009. Dalam periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,82 menjadi 0,72. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan yang disertai oleh distribusinya yang makin merata.

Dalam periode 2005-2006 terdapat 15,2 juta orang yang berhasil keluar dari kemiskinan, 63,8% di antaranya berada di pedesaan. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, jumlah penduduk yang keluar dari kemiskinan meningkat menjadi 28,7 juta orang dalam periode 2006-2007. Sebaliknya, jumlah penduduk yang menjadi miskin turun dari 19,4 juta orang menjadi 16,6 juta orang dalam periode tersebut. Penduduk yang tetap miskin (*chronic poverty*) tidak banyak berubah, yaitu 19,9 juta orang dalam periode 2005-2006 dan 18,6 juta orang dalam periode 2006-2007.

Distribusi geografis menunjukkan sekitar 56,7% penduduk miskin berada di Jawa, selaras dengan pangsa penduduk di Jawa sebesar 60% dari total penduduk (BPS, 2009b). Namun perbandingan berdasarkan propinsi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Papua (37,5%), Papua Barat (35,7%), dan Maluku (28,2%), sementara terendah di DKI Jakarta (3,6%), Kalimantan Selatan (5,1%), dan Bali (5,1%).

2.4. Penduduk Miskin di Pedesaan

Data pada tahun 1998-2009 menunjukkan, sekitar 65,4% penduduk miskin berada di pedesaan. Berbeda dengan *trend global*, perubahan proporsi penduduk miskin antara desa dan kota di Indonesia tidak menunjukkan perubahan signifikan. Menurut data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2004, sekitar 75% penduduk miskin di pedesaan bekerja di sektor pertanian, 41,7% dari penduduk miskin tersebut bekerja sebagai petani padi dan 18,1% bekerja di sektor non-pertanian (McCulloh, 2007).

Penduduk miskin di pedesaan adalah buruh tani, petani kecil, dan pekerja non-pertanian informal. Sajogyo (1977) mendefinisikan petani kecil sebagai rumah tangga yang mengusahakan lahan pertanian <0,5 hektar. Berdasarkan definisi tersebut, maka jumlah petani kecil meningkat dari 9,59 juta rumah tangga (45,3%) pada tahun 1993 menjadi 14,07 juta rumah tangga (56,4%) pada tahun 2003. Pada tahun 2007, dari 17,8 juta petani tanaman pangan terdapat 9,6 juta (53,3%) petani kecil (BPS, 2009c).

Di pedesaan Jawa, proporsi petani kecil mencapai 57,1% pada tahun 2007 (Sudaryanto dkk, 2009). Sementara jumlah buruh tani meningkat dari 8,3 juta orang (21,1%) pada tahun 1983 menjadi 14,4 juta orang (24,8%) pada tahun 2003. Studi kasus di beberapa desa Jawa dan Luar Jawa menunjukkan bahwa pendapatan buruh tani lebih tinggi dari pendapatan petani kecil, dan sekitar 60% pendapatan mereka bersumber dari kegiatan non-pertanian (Susilowati dkk, 2008).

Meningkatnya jumlah petani kecil disebabkan oleh beberapa faktor: (a) tingginya kepadatan penduduk (terutama di Jawa), sedangkan kesempatan kerja di sektor non-pertanian terbatas; (b) terbatasnya luas lahan dan konversi lahan pertanian untuk penggunaan lain; dan (c) budaya sistem pewarisan lahan pertanian yang menyebabkan luas usaha lahan makin kecil dan terpecah; (d) budaya keterikatan penduduk dengan lahan pertanian yang menyebabkan mereka sulit berpindah ke pekerjaan lain (Sudaryanto dkk, 2009; Chand, 2009).

III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Majelis dan Hadirin yang Saya Hormati,

3.1. Karakteristik Penduduk Miskin

Di tingkat rumah tangga, penduduk miskin memiliki karakteristik: (a) tinggal di daerah terpencil, jauh dari fasilitas jalan, pasar, sekolah,

dan pelayanan kesehatan; (b) tersisihkan karena faktor etnik, jender, atau cacat; (c) keterbatasan aset, pendidikan, dan akses terhadap kredit (Rusastra dan Napitupulu, 2008).

Aspek non-ekonomi dari kemiskinan terdiri atas lima faktor, yaitu: (a) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar; (b) rentan terhadap guncangan faktor eksternal; (c) rendahnya kualitas SDM; (d) terbatasnya keterlibatan dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan; dan (e) ketidakmampuan berusaha karena cacat (Sudaryanto dan Rusastra, 2006).

Penduduk miskin di perdesaan memiliki karakteristik: (a) jumlah anak lebih banyak; (b) pekerjaan utama di sektor pertanian (58,8%); (c) sebagian besar (41,7%) tidak tamat SD; (d) sebagian besar (71,0%) pengeluaran rumah tangga untuk pangan; (e) tingkat pelayanan kesehatan rendah (Rusastra dan Napitupulu, 2008).

3.2. Penyebab Kemiskinan

(1) Kualitas sumberdaya alam yang rendah dan rentan terhadap gangguan eksternal (*geographical trap*). Daerah dengan kualitas sumberdaya alam rendah (lahan sub-optimal dan lahan kritis), misalnya NTT, memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kronis. Dalam kondisi demikian produktivitas pertanian dan pendapatan petani rendah (Sudaryanto dkk, 2007). Selain faktor alam, perlambatan kenaikan produktivitas juga berkaitan dengan eksese negatif dari revolusi hijau (Hafsah dan Sudaryanto, 2000).

(2) Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum memberikan prioritas pada wilayah miskin. Beberapa propinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi ternyata memiliki kelimpahan sumberdaya alam, misalnya Papua dan Papua Barat. Dalam kasus ini, kemiskinan umumnya disebabkan oleh rendahnya intensitas kegiatan ekonomi untuk memanfaatkan sumberdaya alam (Rusastra dan Sudaryanto, 1998). Kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut belum mendapat prioritas utama. Tujuan investasi swasta masih terkonsentrasi di Wilayah Barat Indonesia. Kebijakan otonomi

daerah juga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendayagunakan sumberdaya alam setempat (Sudaryanto dan Jamal, 2000).

(3) Keterbatasan infrastruktur. Kualitas infrastruktur pertanian dan perdesaan berdampak pada: (a) secara langsung meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian; (b) memperlancar akses penduduk miskin terhadap peluang kegiatan ekonomi; (c) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap berbagai pelayanan publik.

(4) Terbatasnya akses terhadap aset produktif, terutama lahan pertanian. Bagi penduduk pedesaan, penguasaan lahan pertanian merupakan indikator kesejahteraan, karena lahan menjadi sumber pendapatan. Tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan umumnya disebabkan oleh banyaknya jumlah petani kecil dan buruh tani yang tidak memiliki lahan (Sajogyo, 1977). Keterbatasan aset produktif lainnya (khususnya modal) menyebabkan petani kecil cenderung mengusahakan komoditas pangan yang memberikan pendapatan relatif rendah (Sudaryanto dkk, 2009).

(5) Tersisihkan karena aspek gender, etnik, dan cacat. Aspek yang sering luput dari pengamatan adalah adanya kelompok masyarakat yang secara sistematis tidak dapat mengakses kegiatan ekonomi produktif (Ahmed *et al.*, 2007). Suku terasing dan *indigenous groups* adalah kelompok masyarakat yang tetap menunjukkan tingkat kemiskinan kronis (Sudaryanto dkk, 2009). Pada tingkat rumah tangga dan individu, kemiskinan kronis dialami pula oleh rumah tangga wanita dan penyandang cacat.

(6) Rendahnya kapasitas SDM. Kualitas SDM yang dapat diukur dari tingkat pendidikan berdampak terhadap produktivitas pertanian, akses terhadap kesempatan kerja, kredit dan pelayanan publik lainnya. Menurut data Suvey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2008, sekitar 10,4% pekerja pertanian tidak pernah sekolah, 22,9% tidak tamat SD, dan 49,8% hanya tamat SD.

IV. PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang Terhormat,

4.1. Mendorong Pertumbuhan PDB

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan sudah terbukti positif secara global, termasuk di Indonesia. Dalam periode 1976-1996, saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata di atas 7%/tahun, tingkat kemiskinan turun drastis dari 40,1% pada tahun 1976 menjadi 11,1% pada tahun 1996 (World Bank, 2006). Dalam periode 1993-2002, penurunan tingkat kemiskinan disebabkan oleh keberhasilan intensifikasi pertanian, khususnya tanaman pangan. Pertumbuhan sektor pertanian memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Kaitan pertumbuhan sektor pertanian dengan penurunan tingkat kemiskinan antara lain terjadi melalui pertumbuhan produktivitas. Khusus untuk tanaman pangan, pertumbuhan produktivitas bersumber dari penggunaan masukan, yaitu pupuk, benih, dan tenaga kerja (Sudaryanto *et al.*, 1994). Pertumbuhan produktivitas padi yang mencapai rata-rata 3,29%/tahun pada periode 1970-1980 menjadi penyebab utama tingginya penurunan tingkat kemiskinan pada periode tersebut (Sudaryanto dan Swastika, 2008).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih efektif mengatasi kemiskinan bila disertai dengan pemerataan pendapatan yang lebih baik. Pada saat ini, walaupun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tetapi distribusi pendapatan cenderung makin timpang. Indeks Gini untuk tingkat pendapatan meningkat dari 0,32 pada tahun 2004 menjadi 0,36 pada tahun 2007 (BPS, 2008).

4.2. Mendorong Pertumbuhan Sektor Non-Pertanian

Selain kontribusi langsung dalam bentuk pertumbuhan PDB, sektor pertanian juga berperan secara tidak langsung dalam pengentasan kemiskinan melalui keterkaitannya dengan pertumbuhan sektor non-pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan sektor-sektor lainnya, yang akhirnya berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Chand, 2009). Keterkaitan antara sektor pertanian dan non-pertanian terjadi melalui kegiatan produksi, konsumsi, dan pasar input. Berdasarkan analisis di beberapa negara Asia, *multiplier* pendapatan sektor pertanian terhadap sektor non-pertanian berkisar antara 1,6-1,8. Artinya, setiap Rp 1 peningkatan pendapatan sektor pertanian meningkatkan pendapatan sektor non-pertanian Rp 0,6-0,8 (Haggblade *et al.*, 2007). Bagi petani kecil dan rumah tangga yang tidak memiliki lahan, kontribusi pendapatan dari kegiatan non-pertanian masing-masing mencapai 46,5% dan 60% (Susilowati dkk, 2008).

4.3. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Tingkat Upah

Walaupun persentasenya terus menurun, sektor pertanian masih menyerap 41% tenaga kerja. Dengan demikian, sektor pertanian masih berperan penting sebagai *buffer* dalam penyerapan tenaga kerja, termasuk buruh tani dan petani kecil.

Dalam jangka panjang, kontribusi sektor pertanian terhadap kesempatan kerja diperkirakan terus menurun dengan makin banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor lain. Elastisitas kesempatan kerja terhadap pendapatan sektor pertanian juga terus menurun (Sudaryanto *et al.*, 1982). Sejalan dengan proses tersebut, perbedaan produktivitas tenaga kerja antara sektor pertanian dan non-pertanian semakin kecil (Sudaryanto dkk, 1982; Saliem dkk, 2006).

Bagi petani kecil, karena terbatasnya pengusahaan lahan, curahan kerja di sektor non-pertanian makin penting (Sudaryanto dkk,

1982). Hal ini disertai pula oleh meningkatnya tingkat upah yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan buruh tani. Dalam periode 1970-2008 upah riil buruh tani meningkat 1,6%/tahun.

Walaupun peningkatan kesempatan kerja cenderung lebih intensif di wilayah beririgasi, namun dengan migrasi tenaga kerja dari wilayah sub-optimal, tingkat upah antar-kedua agroekosistem tersebut hampir sama (Sudaryanto, 1989). Migrasi tenaga kerja dari wilayah sub-optimal ke wilayah lain yang lebih produktif berperan dalam mengurangi ketimpangan upah dan pendapatan antar-wilayah (Sudaryanto dan Kasryno, 1994).

4.4. Menyediakan Pangan dengan Harga Terjangkau

Bagi penduduk berpendapatan rendah, pengeluaran untuk pangan mencapai 67-72% dari total pengeluaran rumah tangga, 16-26% di antaranya pengeluaran untuk beras (McCulloh, 2007). Pengeluaran untuk pangan juga menyumbang 73,6% terhadap nilai garis kemiskinan (BPS, 2009). Kenaikan harga bahan pangan memberikan kontribusi sebesar 57,8% terhadap tingkat inflasi. Khusus untuk beras, 62,4% penduduk perdesaan *net consumer* beras dan 9,3% dari petani padi juga *net consumer* beras. Oleh karena itu ketersediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau dan stabil merupakan salah satu indikator pembangunan yang penting, terutama kaitannya dengan kesejahteraan penduduk miskin.

Pada tahun 2007, konsumsi energi penduduk Indonesia rata-rata 2.015 kilo kalori/kapita/hari, lebih tinggi dari tingkat konsumsi menurut rekomendasi sebesar 2.000 kilo kalori/kapita/hari (Apriyantono, 2009). Konsumsi protein penduduk sudah mencapai 55,7 g/kapita/hari, juga lebih tinggi dari tingkat konsumsi yang direkomendasikan 55,4 g/kapita/hari. Namun, pada tahun 2005 sekitar 21% rumah tangga yang berpendapatan rendah termasuk ke dalam kategori rumah tangga rawan pangan (Saliem dan Ariningsih, 2008).

Harga bahan pangan di dalam negeri umumnya relatif stabil dibandingkan dengan di pasar dunia (Sudaryanto, 1992). Selama krisis pangan pada tahun 2008, harga bahan pangan di dalam negeri

tetap stabil walaupun terjadi peningkatan harga di pasar dunia (Susilowati, 2009; Sudaryanto, 2009). Pasokan pangan yang cukup dengan harga terjangkau dan stabil merupakan dampak dari: (a) percepatan kenaikan produksi pangan di dalam negeri, khususnya padi dan jagung; dan (b) kebijakan stabilisasi harga (Apriyantono, 2009).

Walaupun harga bahan pangan dikendalikan, namun usahatani tanaman pangan masih menguntungkan. Pada tahun 2008, pendapatan usahatani padi mencapai Rp 7,0 juta/ha, atau 95,7% dari biaya produksi (Sudaryanto dan Rahman, 2008). Dengan demikian, kombinasi antara kebijakan stabilisasi harga dan kebijakan insentif usahatani dapat dicapai secara bersamaan.

V. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang Terhormat,

5.1. Nasional

Kabinet Indonesia Bersatu telah menggariskan *triple track strategy* dalam pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth*, *pro employment*, dan *pro poor* (BAPPENAS, 2005). Implementasi lebih lanjut dari *grand strategy* tersebut diformulasikan menjadi strategi, kebijakan, dan program yang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (a) strategi dan kebijakan umum yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan secara makro; (b) program spesifik yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program inti PNPM terdiri atas: (a) Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan (b) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Royat, 2008). Di samping itu terdapat 55

program khusus di masing-masing Kementrian/Lembaga yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kedua program inti tersebut (PNPM penguatan).

Program dan proyek tersebut pada prinsipnya diarahkan untuk: (a) dalam jangka pendek berfungsi sebagai jaring pengaman sosial agar penduduk miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk makanan, kesehatan, dan pendidikan; (b) mendorong kemampuan produktivitas penduduk miskin melalui fasilitasi permodalan dan bimbingan usaha; dan (c) pemberdayaan kelembagaan masyarakat agar mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya.

Beberapa masalah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program tersebut adalah: (a) koordinasi, baik substansi maupun lokasi dan anggaran antar-berbagai program; (b) perbedaan latar belakang historis dari program tersebut menyebabkan berbeda pula dampaknya dalam menanggulangi kemiskinan; dan (c) dampak program tersebut terhadap penurunan kemiskinan belum dievaluasi secara menyeluruh.

5.2. Sektor Pertanian

Di sektor pertanian terdapat beberapa program/ proyek yang dirancang secara khusus untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu: (a) Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K); (b) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI); (c) *Participatory Integrated Development of Rainfed Agriculture* (PIDRA); (d) Program Rintisan Akselerasi Diseminasi Inovasi Teknologi (PRIMATANI); dan (e) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Komponen utama dari program tersebut adalah: (a) bantuan modal untuk memfasilitasi kegiatan usaha; (b) rintisan/pengembangan kegiatan usaha pertanian dan non-pertanian; (c) diseminasi inovasi teknologi pertanian; (d) pemberdayaan petani kecil melalui pendampingan dan pelatihan; (e) pembentukan/penguatan kelembagaan desa dan kelembagaan petani; dan (f) stimulan biaya investasi infrastruktur.

Pembelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah: (a) aset atau kemampuan petani kecil terbatas sehingga memerlukan fasilitasi untuk meningkatkan dan memanfaatkannya; (b) peran fasilitator untuk mendorong partisipasi masyarakat menentukan keberhasilan program; (c) pembentukan/penguatan kelompok tani (atau lembaga lain) membantu akses petani terhadap kredit; (d) pengembangan lembaga keuangan mikro perlu disertai oleh fasilitasi kegiatan usaha ekonomi; (e) beberapa program telah berhasil dalam skala pilot yang terbatas, tetapi perluasannya ke wilayah lain mengalami kesulitan; (f) untuk mendorong keberlanjutan kegiatan proyek diperlukan *exit strategy* yang tepat yang disertai oleh pendampingan pasca-proyek secara tidak berkala (Sudaryanto and Kustiari, 2009; Sudaryanto dan Rusastra, 2006; Harniati, 2008).

Dari beberapa program tersebut, PUAP memiliki karakteristik unik yaitu: (a) skala kegiatan lebih besar yang meliputi 10 ribu desa di 33 propinsi dan 481 kabupaten/kota sehingga diharapkan memiliki dampak yang lebih luas; (b) dana bantuan modal untuk fasilitasi kegiatan usaha juga lebih besar (Rp 100 juta/desa). Dari sisi konsepsi, program PUAP sejalan dengan prioritas program untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi berbasis pertanian di daerah miskin. Namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (a) pemilihan desa dan kelompok sasaran belum sepenuhnya konsisten dengan konsep awal; (b) aspek fasilitasi dan penguatan kegiatan usaha masih perlu ditingkatkan; dan (c) perlu peningkatan koordinasi dan sinergi antar-unit kerja Eselon I.

VI. STRATEGI DAN KEBIJAKAN AKSELERASI PENGENTASAN KEMISKINAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin yang Terhormat,

6.1. Sasaran

Sasaran jangka panjang (sampai tahun 2025) program pengentasan kemiskinan di pedesaan adalah terhapusnya penduduk

miskin di sektor pertanian (Sudaryanto dkk, 2007). Sejalan dengan sasaran tersebut, pendapatan petani ditargetkan mencapai US\$ 2.500/ kapita/tahun.

Dalam konsteks MDG, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dari 15,1% pada tahun 1990 menjadi 7,5% pada tahun 2015. Berdasarkan data tingkat kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 32,5 juta orang (14,2%), untuk mencapai sasaran MDG penduduk miskin pada tahun 2015 diperkirakan 18,6 juta orang (7,5%). Dengan sasaran tersebut, penurunan angka kemiskinan harus mencapai rata-rata 2,3 juta orang (3,5%)/tahun. Pada saat yang sama penduduk miskin di pedesaan diperkirakan 12,2 juta orang (9,2%), sehingga target penurunan harus mencapai 415 ribu orang (3,6%)/tahun.

Berdasarkan kinerja yang dicapai hingga tahun 2009, sasaran MDG tersebut sulit dicapai. Jumlah penduduk miskin secara keseluruhan pada tahun 2015 diperkirakan 26,3 juta orang (10,6%), dan di pedesaan 18,1 juta orang atau 14,3% (Sudaryanto dkk, 2009).

6.2. Strategi

Dalam jangka panjang pengentasan kemiskinan diprioritaskan untuk memfasilitasi penduduk miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jangka pendek, sebagian penduduk miskin (khususnya kemiskinan kronis) memerlukan perlindungan dan jaring pengaman sosial agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Sesuai dengan prioritas tersebut, ada dua jalan utama yang dapat ditempuh untuk keluar dari kemiskinan seperti disarankan oleh Bank Dunia (2006), yaitu: (a) transformasi dari pertanian subsisten ke pertanian modern; (b) transformasi dari kegiatan non-pertanian subsisten menjadi usaha non-pertanian formal yang lebih produktif dan menguntungkan.

Masa transisi untuk mencapai jalan utama tersebut meliputi dua alternatif, yaitu: (a) transformasi dari pertanian subsisten ke usaha non-pertanian informal di pedesaan; dan (b) migrasi ke arah kegiatan non-pertanian di perkotaan (tanpa harus berpindah domisili ke kota). Pada masa transisi tersebut, petani subsisten dan rumah tangga yang berusaha non-pertanian informal di pedesaan akan mencari kesempatan kerja dan berusaha di perkotaan.

Mengacu pada konsep tersebut terdapat tiga strategi umum dalam pengentasan kemiskinan yang perlu ditempuh secara bersamaan yaitu: (1) akselerasi tingkat pertumbuhan sektor pertanian; (2) perluasan dan pengembangan usaha non-pertanian di pedesaan; (3) peningkatan sistem perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha dan kelangsungan hidup penduduk miskin.

(1) Akselerasi tingkat pertumbuhan sektor pertanian

Upaya percepatan penurunan tingkat kemiskinan memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diarahkan secara tepat untuk memberikan manfaat bagi penduduk miskin dengan ciri: (a) prioritas pada sektor pertanian yang memberikan dampak langsung kepada kelompok miskin; (b) meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat upah. Mengingat sektor pertanian Indonesia masih didominasi oleh petani kecil, maka prioritas pengembangan tetap diarahkan kepada modernisasi pertanian skala kecil (Sudaryanto *et al.*, 2009).

Untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan sesuai dengan MDG, PDB sektor pertanian perlu dipacu untuk tumbuh sekitar 5%/tahun sampai tahun 2015 (Sudaryanto *et al.*, 2009). Dengan demikian pendapatan penduduk miskin di pedesaan diharapkan dapat tumbuh lebih cepat. Sasaran pertumbuhan dapat dicapai melalui modernisasi pertanian dengan unsur-unsur: (a) diversifikasi ke arah komoditas bernilai tinggi yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi pula; (b) peningkatan investasi infrastruktur pertanian; (c)

akselerasi inovasi teknologi pertanian; dan (d) peningkatan akses pasar, baik domestik maupun internasional.

Upaya akselerasi pertumbuhan sektor pertanian perlu disertai dengan strategi untuk pemerataan pendapatan, agar manfaatnya dapat menjangkau penduduk miskin. Strategi tersebut meliputi: (a) peningkatan akses penguasaan lahan; (b) peningkatan investasi yang lebih merata antar-daerah maupun antar-sektor; (c) perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin; (d) peningkatan kapasitas kelompok miskin untuk memanfaatkan kegiatan usaha dan kesempatan kerja baru.

2) Perluasan dan pengembangan usaha non-pertanian

Dengan kejenuhan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, transformasi kegiatan ekonomi ke sektor non-pertanian perlu dikembangkan secara bersamaan. Kegiatan usaha non-pertanian yang dilaksanakan diharapkan dapat memperluas sumber pendapatan petani miskin untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dalam jangka panjang hal ini memberikan dampak balik terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, karena tenaga kerja makin berkurang sementara produksi terus meningkat (Hadiwigeno dkk, 1990). Kegiatan non-pertanian yang dikembangkan meliputi berbagai sektor sesuai potensi setempat. Namun, prioritas pengembangan terutama pada sektor agroindustri dan pelayanan jasa penunjang sektor pertanian.

(3) Peningkatan sistem perlindungan dan jaring pengaman sosial bagi penduduk miskin

Penduduk miskin sangat rentan terhadap gangguan kondisi eksternal, baik bencana alam maupun gangguan sosial-ekonomi. Sebagian dari mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan skema perlindungan dan bantuan yang ditargetkan langsung kepada mereka. Selain skema umum yang telah dikembangkan secara nasional, dalam sektor pertanian perlu skema

bantuan bencana alam untuk mengurangi kerugian bagi petani kecil. Instrumen perlindungan yang lebih baik dan menggunakan mekanisme pasar adalah Asuransi Pertanian untuk melindungi petani dari kerugian bencana alam, gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan fluktuasi harga komoditas (Sudaryanto *et al.*, 2009). Perlu pula dikembangkan upaya perlindungan bagi petani kecil dari persaingan komoditas impor. Para importir perlu didorong untuk turut membantu pengembangan usahatani kecil melalui hubungan *grower-importer*. Strategi ini bersifat jangka pendek tetapi akan mempengaruhi efektivitas strategi jangka panjang.

6.3. Arah Kebijakan

(1) Pengembangan infrastruktur pertanian dan pedesaan

Jenis infrastruktur yang paling penting adalah jalan untuk menghubungkan penduduk miskin ke berbagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam sektor pertanian, infrastruktur paling strategis adalah jaringan irigasi. Pada saat ini sekitar 70% jaringan irigasi tidak berfungsi penuh. Oleh karena itu, prioritas investasi irigasi perlu diarahkan pada rehabilitasi jaringan yang tidak berfungsi. Jenis infrastruktur lain yang perlu diprioritaskan adalah jalan usahatani yang menghubungkan lokasi kegiatan produksi dengan pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan di pedesaan.

(2) Peningkatan akses terhadap penguasaan aset produktif

Untuk meningkatkan akses penduduk miskin terhadap lahan pertanian, diperlukan langkah kebijakan sebagai berikut: (a) percepatan realisasi reforma agraria yang didukung oleh komitmen politik; (b) perluasan lahan pertanian yang pemanfaatannya diprioritaskan bagi penduduk miskin; (c) peningkatan akses penguasaan lahan melalui perbaikan sistem sewa, bagi hasil, gadai, dll. Agar penduduk miskin dapat memanfaatkan lahan yang dikuasainya secara lebih optimal, diperlukan langkah kebijakan yang dilaksanakan secara simultan dalam aspek pengembangan infrastruktur, teknologi, akses pasar, dll.

(3) Diversifikasi usahatani komoditas bernilai tinggi

Penduduk miskin pada umumnya bekerja pada usahatani tanaman pangan yang harganya relatif rendah. Di pihak lain, peluang pasar komoditas pertanian bernilai tinggi (hortikultura, perkebunan, dan peternakan) makin terbuka untuk pasar domestik maupun ekspor (Sudaryanto dan Susilowati, 1991). Guna memanfaatkan peluang tersebut perlu dikembangkan kebijakan yang berimbang untuk mendorong diversifikasi usahatani ke arah komoditas bernilai tinggi dalam rangka mempertahankan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan tersebut meliputi aspek infrastruktur, inovasi teknologi, peningkatan akses pasar, dan anggaran pembangunan (Sudaryanto dkk, 2002; Sudaryanto dan Suryana, 1990).

(4) Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan

Salah satu aspek krusial dalam pengentasan kemiskinan adalah peningkatan kapasitas SDM sesuai standar yang diperlukan. Hal ini memerlukan upaya sistematis di bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik aspek teknis maupun manajerial dan sosial.

Pada saat yang sama diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat kelembagaan petani dan masyarakat desa pada umumnya. Kelembagaan tersebut meliputi: (a) kelembagaan kegiatan ekonomi produktif; (b) kelembagaan pengelolaan sumberdaya bersama; dan (c) kelembagaan lobi politik ekonomi. Inisiatif Departemen Pertanian untuk mengembangkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Kelompok Tani perlu diperluas untuk menjangkau bentuk kelembagaan lainnya sesuai dengan tatanan sosial budaya setempat.

(5) Kebijakan dan program yang ditargetkan untuk penduduk miskin

Kebijakan dan program pembangunan pertanian perlu lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di pedesaan. Dalam kaitan ini terdapat tiga hal penting yaitu: (a)

rancangan kebijakan dan program disesuaikan dengan karakteristik penduduk miskin; (b) kebijakan subsidi (khususnya pupuk dan benih) disalurkan secara langsung kepada petani kecil; (c) alokasi anggaran pembangunan di setiap daerah memperhatikan intensitas kemiskinan di daerah tersebut; dan (d) pemilihan lokasi kegiatan mempertimbangkan potensi pertanian dan intensitas kemiskinan.

VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Hadirin Sekalian,

7.1. Kesimpulan

Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, khususnya di sektor pertanian. Namun target penurunan tingkat kemiskinan seperti ditetapkan dalam MDG sulit dicapai tanpa strategi akselerasi pertumbuhan sektor pertanian.

Penyebab utama terjadinya kemiskinan di pedesaan adalah (a) kebijakan pembangunan ekonomi belum memberikan prioritas pada wilayah miskin; (b) kualitas sumberdaya alam rendah dan rentan terhadap gangguan eksternal; (c) rendahnya kualitas infra-struktur; (d) terbatasnya akses terhadap aset produktif, khususnya lahan pertanian; (e) terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi produktif dan kegiatan sosial-kemasyarakatan; (f) rendahnya kualitas SDM; (g) tersisihkan karena aspek gender, etnik, dan cacat; dan (h) gangguan sosial-politik yang berkepanjangan.

Peranan sektor pertanian dalam penanggulangan kemiskinan: (a) mendorong pertumbuhan PDB; (b) mendorong pertumbuhan sektor non-pertanian; (c) meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat upah; (d) menyediakan pangan dengan harga terjangkau.

7.2. Impikasi Kebijakan

Strategi utama yang perlu ditempuh dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan adalah: (a) akselerasi tingkat pertumbuhan sektor pertanian; (b) perluasan dan pengembangan usaha non-pertanian, terutama agroindustri, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian; (c) peningkatan sistem perlindungan dan jaring pengaman sosial.

Dalam rangka revitalisasi peran sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan PDB pertanian perlu dipacu menjadi sekitar 5%/tahun sampai tahun 2015. Untuk itu perlu dikembangkan diversifikasi pertanian dengan mengakomodasikan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang disertai dengan upaya peningkatan investasi dalam pengembangan infrastruktur dan inovasi teknologi pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi produktif penduduk miskin diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian. Hal ini meliputi percepatan reforma agraria, perluasan areal pertanian, dan fasilitasi penguasaan lahan melalui sistem sewa, sakap, gadai, dll.

Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, harga bahan pangan perlu dipertahankan pada tingkat yang terjangkau dan stabil tanpa merugikan petani. Peningkatan produksi pangan dan pendapatan usahatani perlu ditempuh melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanpa penerapan kebijakan harga yang distortif.

VIII. PENUTUP

Majelis dan Hadirin yang Terhormat,

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan diperlukan kebijakan dan program pembangunan pertanian bersifat multidisiplin dan holistik. Perumusan kebijakan yang tepat

memerlukan penelitian secara sistematis dengan fokus pada: (a) dinamika kemiskinan daerah tertinggal, wilayah sub-optimal, wilayah perbatasan, dan kelompok etnik minoritas; (b) strategi keluar dari kemiskinan pada tingkat rumah tangga; (c) kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dinamika kemiskinan di pedesaan perlu dimonitor secara berkala dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya saya memiliki kesempatan untuk meniti kehidupan, termasuk menyelesaikan orasi ini.

Kepada kedua orang tua, Ibu Ukasih dan Bapak I. Nawita (alm) saya haturkan terima kasih yang tidak terhingga atas limpahan kasih sayang dan pengorbanan untuk membesarkan dan mengantarkan anaknya meniti karir seperti saat ini. Juga kepada mertua, Ibu Nene dan Bapak Somawiharja (alm), disampaikan hormat dan terima kasih, atas dorongan dan doa yang tak pernah berhenti.

Kepada para guru dan dosen, dari SD sampai perguruan tinggi, saya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya memberikan ilmu pengetahuan untuk meniti kehidupan.

Perjalanan karier yang telah saya lalui tidak terlepas pula dari kontribusi dan pengaruh pimpinan instansi dan para senior saya. Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian, Bapak Dr. Gatot Irianto. Hal serupa juga disampaikan kepada Prof. Dr. Achmad Suryana, Bapak Dr. Joko Budianto, dan Bapak Dr. Faisal Kasryno sebagai Kepala Badan Litbang Pertanian periode sebelumnya. Kepada Bapak Prof. Dr. Effendi Pasandaran, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial-Ekonomi Pertanian periode tahun 1994-1998, juga saya sampaikan terima kasih.

Penghormatan khusus saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Sjarifuddin Baharsyah yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada saya mengembangkan karier, sejak beliau menjabat Kepala Pusat Agro Ekonomi tahun 1978.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada rekan-rekan pejabat Eselon II lingkup Badan Litbang Pertanian, baik yang masih aktif saat ini maupun yang menjabat pada periode sebelumnya, atas kerja sama dan suasana kekeluargaan yang diciptakan. Kepada rekan-rekan pejabat struktural, peneliti dan seluruh karyawan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, saya merasa berhutang budi atas bantuan dan kerja sama dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

Ucapan dan penghargaan saya sampaikan kepada Tim Evaluator Pengukuhan Profesor Riset Badan Litbang Pertanian dan LIPI, khususnya Prof. Dr. Irsal Las, Prof. Dr. Made Oka Manikmas, Prof. Dr. Endang Sukara, Prof. Dr. Umar Anggara Jenie dan seluruh anggota Majelis Pengukuhan Profesor Riset, atas saran-saran perbaikan materi orasi ini. Kepada rekan-rekan peneliti PSE-KP, khususnya Prof. Dr. Pantjar Simatupang dan Prof. Dr. Kedi Suradisastra, saya sampaikan terima kasih atas saran-saran untuk perbaikan naskah orasi ini. Demikian juga kepada Panitia Penyelenggara Orasi dan seluruh hadirin, saya sampaikan terima kasih atas kelancaran penyelenggaraan dan kesabarannya untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ini.

Akhirnya kepada istri tercinta Kartini yang dengan sabar selalu mendampingi di kala senang maupun susah, saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Kepada kedua anak tersayang, Karlina Sari dan Melinda Sari, yang selalu menjadi pendorong dan bahan inspirasi, saya sampaikan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A.U., R.V. Hill, D.M. Wiesmann. 2007. The Poorest and Hungry: Looking Below the Line. 2020 Focus Brief on the World's Poor and Hungry People. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, D.C., U.S.A.
- Apriyantono, A. 2009. Towards Sustainable Agriculture and Food Security. Presented at the Ministerial Roundtable in the 65th Session of the Commission, Bangkok, 27-29 April 2009.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2008. Profil Kemiskinan Indonesia (mimeo). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2009a. Growth Rate of Gross Domestic Product at 2000 Constant Market Price by Industrial Origin. [Http://www.bps.go.id/sector/nra/gdp/tables/html](http://www.bps.go.id/sector/nra/gdp/tables/html).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2009b. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009. Berita Resmi Statistik, No.43/07/Th.XII, 1 Juli, 2009.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2009c. Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09). Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2008, Statistik Indonesia: Tahun 2008. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2004. Data dan Informasi Kemiskinan. Badan Pusat Statistik, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2003. Statistik Indonesia: Tahun 2003. Badan Pusat Statistik, Jakarta

- Chen, S., M. Ravallion. 2007. The Changing Profile of Poverty in the World. 2020 Focus Brief on the World's Poor and Hungry People. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, D.C., U.S.A.
- Chen, S., M. Ravallion. 2008. The Developing World is Poorer than We Thought, but No Less Successful in the Fight Against Poverty. Policy Research Working Paper No.4703. Development Research Group, The World Bank, Washington, D.C., U.S.A.
- Chand, R. 2009. Poverty and Hunger in Asia. Paper presented at the Regional Capacity Building Training Workshop. IFAD and FAO, 15-25 June 2009, Bangkok, Thailand.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta.
- Hadiwigono, S., E. Pasandaran, T. Sudaryanto. 1992. Perekayasaan Transformasi Struktur Perekonomian Nasional dengan Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian. *Pangan*, III(11):72-81.
- Hafsah, M.J., T. Sudaryanto. 2000. Sejarah Intensifikasi Padi dan Prospek Pengembangannya. *Dalam*: F. Kasryno, E. Pasandaran, A.M. Fagi (Penyunting). *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Haggblade, S., P.B.R. Hazel, P.A. Dorosh. 2007. Sectoral Growth Linkages between Agriculture and the Rural Nonfarm Economy. *In* S.Haggblade, P.B.R.Hazel, T.Reardon (eds). *Transforming the Rural Nonfarm Economy*. The John Hopkin University Press, Baltimore, U.S.A.
- Harniati. 2008. Program-program Sektor Pertanian yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan: Pengalaman Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) sebagai Sebuah Model Penanggulangan Kemiskinan. *Dalam* Y. Yusdja, A.R. Nurmanaf, I.S. Anugrah (Penyunting). *Prosiding Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam*

- Penanggulangan Kemiskinan, Bogor, 21 Agustus, 2007: 9-22. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Irawan, P.B. 2000. Analisis Sensitifitas Pada Pengukuran Kemiskinan: Fenomena Kemiskinan Sementara Selama Krisis Ekonomi. *Dalam* A.K. Seta, M. Atmowidjojo, S.M. Atmojo, A.B. Jahari, P. B.Irawan, T.Sudaryanto (Penyunting) Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, 29 Pebruari-2 Maret 2000. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Pakpahan, A., Hermanto, M.H. Sawit. 1995. Kemiskinan di Pedesaan, Konsep, Masalah dan Penang-gulangnya. *Dalam* Hermanto, A. Pakpahan, M.H. Sawit, A.H. Taryoto, A. Zulham, H.P. Saliem (Penyunting). Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian: Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Quibria, M.G. 1991. Understanding Poverty: An Introduction to Conceptual and Measurement Issues. *Asian Development Bank Review* 9(2):91-112.
- Raharto, A., H. Romdiati. 2000. Identifikasi Rumah tangga Miskin. *Dalam* A.K. Seta, M. Atmowidjojo, S.M. Atmojo, A.B. Jahari, P. B. Irawan, T. Sudaryanto (Penyunting). Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, 29 Pebruari-2 Maret 2000. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Ravalion, M. 2007. Economic Growth and Poverty Reduction: Do Poor Countries Need to Worry About Inequality?. 2020 Focus Brief on the World's Poor and Hungry People. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, D.C., U.S.A.
- Royat, S. 2008. Kebijakan Pemerintah dalam Penang-gulangan Kemiskinan. *Dalam* Y. Yusdja, A.R. Nurmanaf, I.S. Anugrah (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan, Bogor, 21 Agustus, 2007: 9-22. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

- Rusastra, I.W. dan T.A. Napitupulu. 2008. Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Pedesaan. *Dalam* Y.Yusdja, A.R. Nurmanaf, I.S. Anugrah (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan, Bogor, 21 Agustus, 2007: 9-22. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Rusastra, I.W., T. Sudaryanto. 1998. Dinamika Ekonomi Pedesaan dalam Perspektif Pembangunan Nasional. *Dalam* A. Suryana, I.W. Rusastra, M. Rachmat, A. Purwoto. (Penyunting). Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Saliem, H.P. dan E. Ariningsih. 2009. Perubahan Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga di Pedesaan: Analisis Data SUSENAS 1999-2005. *Dalam* K. Suradisastra, Y. Yusdja, A.R. Nurmanaf (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional: Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Tantangan dan Peluang bagi peningkatan Kesejahteraan Petani, Bogor, 19 Nopember 2008. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Saliem, H.P., Sumaryanto, G.S. Hardono, H. Mayrowani, T.B. Purwantini, Y. Marisa, D. Hidayat. 2006. Diversifikasi Usaha Rumahtangga dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Sajogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasinya dalam Pembangunan Desa. *Prisma* VI (3):10-17.
- Sudaryanto, T. 2009. Government Policy Response to the Impact Of Global Food Security Crises. Paper prepared for the International Seminar on Agricultural and Food Policy Reforms: Food Security from the Perspectives of Asian Small-scale Farmers, August 24-28, 2009, Seoul, South Korea.

- Sudaryanto, T., S.H. Susilowati, P.U. Hadi. 2009. Sasaran Pembangunan Pertanian: 2010-2014 (mimeo). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Sudaryanto, T., S.H. Susilowati, Sumaryanto. 2009. Increasing Trend of Small Farms in Indonesia: Causes and Consequences. Paper presented at the 111th EAAE-IAAE Seminar: Small Farms: Persistence or Declined? University of Kent, Canterbury, UK, 25-26 June, 2009.
- Sudaryanto, T. dan B.Rahman. 2008. Analisis Dampak Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah dan Beras. (mimeo). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Sudaryanto, T. dan R. Kustiari. 2008. Poverty Alleviation Programs through Agriculture in Indonesia. *In* J.W.T. Botema, G. Thompson, I.W. Rusastra, R. Baldwin (Eds). CAPSA Monograph No.50, Proceedings of the Regional Meeting: Toward a Joint Regional Agenda for the Alleviation of Poverty through Agriculture and Secondary Crop Development, Bangkok, Thailand, 21-22 November, 2007:63-74. United Nation ESCAP-CAPSA, Bogor.
- Sudaryanto, T. N. Sjafa'at, K. Kariyasa, H.P. Saliem. 2007. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis: Rangkuman Kebutuhan Investasi (Edisi Kedua). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Sudaryanto, T., D.K.S. Swastika, B. Sayaka, S. Bahri. 2007. Financial and Economic Profitability of Rice Farming Across Production Environments in Indonesia. *In* P.K. Aggarwal, J.K. Ladha, R.K. Singh, C. Devakumar, B. Hardi (Eds). 2007. Science, Technology, and Trade for Peace and Prosperity. Proceedings of the 26th International Rice Research Conference, 9-12 October 2006, New Delhi, India. Los Banos (Philippines) and New Delhi (India): International Rice Research Institute, Indian Council of Agricultural Research, and National Academy of Agricultural Sciences. Printed by Macmillan India Ltd.

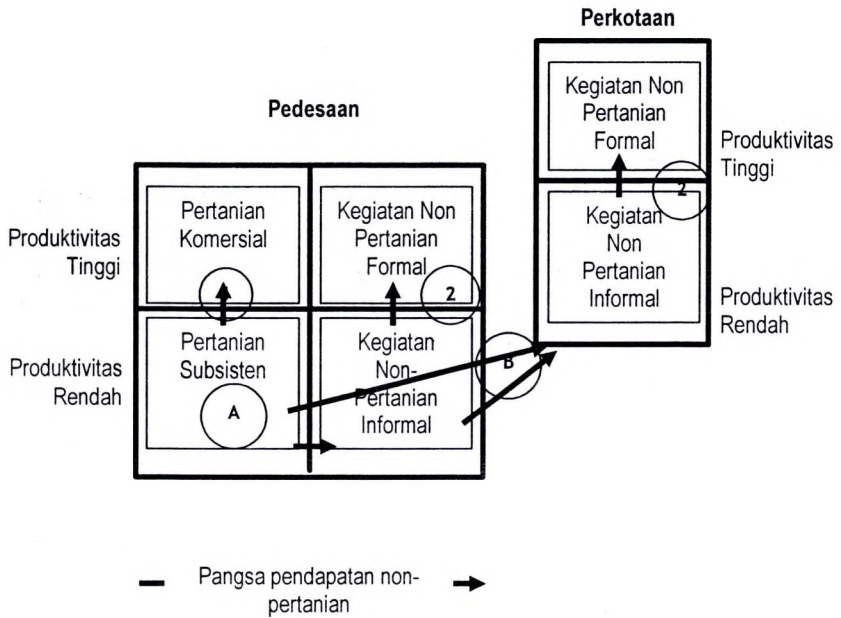
- Sudaryanto, T. dan I W. Rusastra. 2006. Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 25(4):115-122.
- Sudaryanto, T., Erwidodo, B. Rachman. 2002. Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dalam Era Globalisasi. *Dalam* T. Sudaryanto, I W. Rusastra, A. Syam, M. Ariani (Penyunting). Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agro Industri. Monograph Series No.21.
- Sudaryanto, T., P.U. Hadi. S.H. Susilowati, E. Suryani. 2002. Perkembangan Kebijakan Harga dan Perdagangan Komoditas Pertanian. *Dalam* T. Sudaryanto, I W. Rusastra, A. Syam, M. Ariani (Penyunting). Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agro Industri. Monograph Series No.21. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sudaryanto, T., I W. Rusastra, E. Jamal. 2000. Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Dalam*: I W. Rusastra, A.R. Nurmanaf, S.H. Susilowati, E. Jamal, B. Sayaka (Penyunting). Prosiding Seminar Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Rusastra, I. W. dan T. Sudaryanto. 1998. Dinamika Ekonomi Pedesaan dalam Perspektif Pembangunan Nasional. *Dalam* A. Suryana, I W. Rusastra, M. Rachmat, A. Purwoto (Penyunting). Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian (Buku I). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor
- Sudaryanto, T. dan F. Kasryno. 1994. Modern Rice Variety Adoption and Factor Market Adjustment in Indonesia. *In* C.C. David and K. Otsuka (Eds). *Modern Rice Technology and Income Distribution in Asia*. Lynne Rienner Publisher, Boulder & London, and International Rice Research Institute, Manila.

- Sudaryanto, T. dan S.H. Susilowati. 1991. Perkembangan Ekonomi Kakao Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 9(1).
- Sudaryanto, T. dan A. Suryana. 1990. Kebijakan Perda-gangan Internasional dalam Diversifikasi Pertanian. Dalam *Prosiding Seminar Nasional: Diversifikasi Pertanian dalam Mempercepat Laju Pertumbuhan Nasional*. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).
- Sudaryanto, T. 1989. Perubahan Teknologi dan Kesenjangan Tingkat Upah Antar Daerah. 1989. *Jurnal Agro Ekonomi* 8(2):37-49.
- Sudaryanto, T. 1992. Perkembangan Harga Komoditas Pertanian di Pasar Dunia dan Refleksinya di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Per-tanian*, XI(3).
- Sudaryanto, T. dan N. Syafa'at. 1993. Pengaruh Teknologi Baru dan Lingkungan Produksi Terhadap Kesenjangan Pendapatan Antar Agroekosistem. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 10(2).
- Sudaryanto, T., H.P. Saliem, S. Pasaribu. 1982. Tingkat Pencurahan Kerja Rumahtangga di Pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 1(1):1-7.
- Sudaryanto, T., Hermanto, M. Syukur. 1982. Perubahan Struktur Angkatan Kerja dan Perkembangan Tingkat Upah Buruh Tani. *Laporan Penelitian*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Susilowati, S.H., Sumaryanto, R.N. Suhaeti, S. Friyatno, H. Tarigan, N.K. Agustin, C. Muslim. 2008. *Konsorsium Penelitian: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani pada Berbagai Tipe Agroekosistem: Aspek Arah Penguasaan Lahan dan Tenaga Kerja Pertanian*. Laporan Penelian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dan Universitas Padjadjaran Bandung.
- Susilowati, S.H. 2009. Policy Measures For Food Price Inflation in Indonesia: Implications For Rice Industry Development and Food Security. Paper presented at the Australian APEC Study Centre Training Course: Food Security, Structural Reform and

Food Price Inflation: A Training Program in Resolving Policy Conflicts June 17-24, 2009, Melbourne, Australia.

- Susilowati, S.H. 2007. Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. Disertasi Program Doktor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Urip, S. 2008. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Faktor Penyebabnya. *Dalam* Y. Yusdja, A.R. Nurmanaf, I.S. Anugrah (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan, Bogor, 21 Agustus, 2007: 1-8. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- World Bank. 2006. Making the New Indonesia Work for the Poor. World Bank, Washington, D.C., U.S.A.

Lampiran: Pendorong Utama Perubahan Ekonomi Pedesaan dan Transisi Keluar dari Kemiskinan



Sumber : World Bank, 2006. Making the New Indonesia Work for the Poor. World Bank, Washington, D.C., U.S.A.

DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

1. **Sudaryanto, T.**, S.H. Susilowati, Sumaryanto. 2009. Increasing Trend of Small Farms in Indonesia: Causes and Consequences. Paper presented at the 111th EAAE-IAAE Seminar: Small Farms: Persistence or Declined? University of Kent, Canterbury, UK, 25-26 June, 2009.
2. **Sudaryanto, T.** 2009. Government Policy Response to the Impact Of Global Food Security Crises. Paper prepared for the International Seminar on Agricultural and Food Policy Reforms: Food Security from the Perspectives of Asian Small-scale Farmers, August 24-28, 2009, Seoul, South Korea.
3. **Sudaryanto, T.**, S.H. Susilowati, P.U. Hadi. 2009. Sasaran Pembangunan Pertanian: 2010-2014 (mimeo). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
4. **Sudaryanto, T.**, Sumaryanto. 2008. Changing Rural Household Income in Indonesia: 1995-2007. Paper presented at the 6th Asian Association of Agricultural Economist International Conference: Asian Economy Renaissance: What Is in It for Agriculture?. Manila, Philipinnes, 28-30 August, 2008.
5. Sumaryanto dan **T. Sudaryanto**. 2008. Perubahan Pendapatan Rumahtangga Pedesaan: Analisis Data Patanas Tahun 2005-2007. Dalam K. Suradisastra, Y. Yusdja, A.R. Nurmanaf (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Tantangan dan Peluang Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
6. **Sudaryanto, T.**, B. Rahman. 2008. Analisis Dampak Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah dan Beras. (mimeo). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

7. Iqbal, M. dan **T. Sudaryanto**. 2008. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian, 6(2):155-173. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
8. **Sudaryanto, T.** and B. Hutabarat. 2008. Perspective of Agricultural Policy Development in Indonesia: Impacts and Challenge of the New ASEAN Policies. Paper presented at the Symposium on Prospective Agricultural Policy Development in ASEAN Countries: Impacts and Challenges Due to Introduction of New ASEAN Policies. ASEAN Secretariat in Collaboration with the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, the Government of Japan, Langkawi, Malaysia, 27-29 February 2008.
9. **Sudaryanto, T.** dan D.K.S. Swastika. 2008. Development and Policy Issues in Indonesian Rice Industry. Paper presented at Rice Policy Workshop. International Rice Research Institute, Los Banos, Philipinnes, 18-19 February, 2008.
10. **Sudaryanto, T.** dan R. Kustiari. 2008. Poverty Alleviation Programs Through Agriculture in Indonesia. In Botema, J.W.T., Thompson, G., I W. Rusastra, and R. Baldwin (eds). Proceedings of the Regional Meeting Toward a Joint Regional Agenda for the Alleviation of Poverty through Agriculture and Secondary Crop Development. Bangkok, Thailand, 21-22 November, 2007. CAPSA Monograph No.50, UNESCAP-CAPSA, Bogor.
11. **Sudaryanto, T.**, D.K.S. Swastika, B. Sayaka, S. Bahri. 2007. Financial and Economic Profitability of Rice Farming Across Production Environments in Indonesia. In Aggarwal PK, Ladha JK, Singh RK, Devakumar C, Hardi B (eds). 2007. Science, Technology, and Trade for Peace and Prosperity. Proceedings of the 26th International Rice Research Conference, 9-12 October 2006, New Delhi, India. Los Banos (Philipinnes) and New Delhi (India): International Rice Research Institute, Indian Council of Agricultural Research, and National Academy of Agricultural Sciences. Printed by Macmillan India Ltd.

12. **Sudaryanto, T.** dan D.K.S. Swastika. 2007. Ekonomi Kedelai di Indonesia. Dalam: Sumarno, Suyamto, A. Wijono, Hermanto, H. Kasim (Editor). Kedelai: Teknik Produksi dan Pengembangannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
13. **Sudaryanto, T.** N. Sjafa'at, K. Kariyasa, H.P. Saliem. 2007. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis: Rangkuman Kebutuhan Investasi (Edisi Kedua). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
14. **Sudaryanto, T.** dan I W. Rusastra. 2006. Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 25(4):115-122.
15. **Sudaryanto, T.** dan T. Pranadji. 2006. Transformasi Kelembagaan untuk Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian pada Masyarakat Papua. Dalam J. Limbongan, M. Syukur, A. Malik, A.W. Rauf, M. Nggobe (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional: Sumber Energi Baru dan Alternatif Sebagai Solusi Strategis Mendukung Otonomi Daerah. Kerjasama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, 24-25 Juli 2006.
16. Zulham, A. dan **T. Sudaryanto**. 2005. Aceh: Setting the Face For Agricultural Modernization in Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(4):281-297. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
17. **Sudaryanto, T.**, P. Simatupang, K. Kariyasa. 2005. Konsep Sistem Usaha Pertanian serta Peranan BPTP Dalam Rekayasa Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(4):349-366. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
18. Rachman, B., P. Simatupang, **T. Sudaryanto**. 2004. Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Padi. Dalam: H.P. Saliem, E. Basuno, B. Sayaka, W.K. Sejati (Penyunting). 2004. Prosiding Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

19. Rusastra, I.W., B. Rachman, Sumedi, **T. Sudaryanto**. 2004. Struktur Pasar dan Pemasaran Gabah-Beras dan Komoditas Kompetitor Utama. *Dalam*: H.P. Saliem, E. Basuno, B. Sayaka, W.K. Sejati (Penyunting). 2004. Prosiding Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
20. **Sudaryanto, T.**, A. Agustian. 2003. Peningkatan Daya saing Usahatani Padi: Aspek Kelembagaan. Analisis Kebijakan Pertanian, 1(3). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
21. **Sudaryanto, T.**, I.W. Rusastra, T.D. Sudjana. 2002. The Impacts of Economic Crises and Prospects for Livestock Industry in Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian 21(2):56-63.
22. **Sudaryanto, T.**, P. Simatupang, B. Irawan, D.K.S. Swastika. 2002. Medium and Longterm Prospects of Rice Supply and Demand in Indonesia. In: M.Sombila, M.Hossain, B.Hardy (Eds). 2002. Developments in the Asian Rice Economy. Proceedings of the International Workshop on Medium and Longterm Prospects of Rice Supply and Demand in the 21st Century, 3-5 December 2001, Los Banos, Philippines. Los Banos (Philippines): International Rice Research Institute.
23. **Sudaryanto, T.** dan E. Jamal. 2002. Pengembangan Agribisnis Peternakan Melalui Pendekatan *Corporate Farming* untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No.22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
24. **Sudaryanto, T.** dan E. Jamal. 2002. Pengembangan Informasi dan Teknologi Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan dan Agribisnis. *Dalam* T. Sudaryanto, I.W. Rusastra, A. Syam, M. Ariani (Penyunting). Analisis Kebijakan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No.22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

25. **Sudaryanto, T.** dan M. Syukur. 2002. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Dalam* T. Sudaryanto, I.W. Rusastra, A. Syam, M. Ariani (Penyunting). Analisis Kebijakan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No.22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
26. **Sudaryanto, T.** dan I.W. Rusastra. 2002. Kebijakan Strategis Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berwawasan Agribisnis. *Dalam* T. Sudaryanto, I.W. Rusastra, A. Syam, M. Ariani (Penyunting). Analisis Kebijakan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No.22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
27. **Sudaryanto, T.** dan N. Sjafaat. 2002. Kebijakan Pembangunan Pertanian Wilayah. *Dalam* T. Sudaryanto, I W. Rusastra, A. Syam, M. Ariani (Penyunting). Analisis Kebijakan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan-sanaan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No.22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
28. **Sudaryanto, T.** dan E. Basuno. 2002. Peran Teknologi Pertanian Partisipatif dalam Meningkatkan Diversifikasi Produksi Pangan Spesifik Lokasi. *Dalam* T. Sudaryanto, I.W. Rusastra, A. Syam, M. Ariani (Penyunting). Analisis Kebijakan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan-sanaan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No.22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
29. **Sudaryanto, T.,** Erwidodo, B. Rachman. 2002. Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dalam Era Globalisasi. *Dalam* T. Sudaryanto, I W. Rusastra, A. Syam, M. Ariani (Penyunting). Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agro Industri. Monograph Series No.21. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

30. **Sudaryanto, T., P.U.Hadi. S.H.Susilowati, E. Suryani.** 2002. Perkembangan Kebijakan Harga dan Perdagangan Komoditas Pertanian. *Dalam* T. Sudaryanto, I.W. Rusastra, A. Syam, M. Ariani (Penyunting). Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agro Industri. Monograph Series No.21. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
31. **Sudaryanto, T.** 2001. Perkembangan Industri Pupuk, Investasi Irigasi dan Konversi Lahan. *Dalam:* A. Suryana, S. Mardianto (Editor). Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Universitas Indonesia (LPEM-UI), Badan Ketahanan Pangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta.
32. **Sudaryanto, T. dan I W. Rusastra, Saptana.** 2001. Perspektif Pengembangan Ekonomi Kedelai di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 19(1):1-20. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
33. Kasryno, F., E. Pasandaran, P. Simatupang. Erwidodo, T. **Sudaryanto.** 2001. Membangun Kembali Sektor Pertanian dan Kehutanan. *Dalam* I W. Rusastra, P.U. Hadi, A.R. Nurmanaf, E. Jamal, A. Syam. Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
34. **Sudaryanto, T. dan I W. Rusastra.** 2000. Kebijakan dan Perspektif Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 18 (1 dan 2):52-64.
35. Hafsah, M.J. dan **T. Sudaryanto.** 2000. Sejarah Intensifikasi Padi dan Prospek Pengembangannya. *Dalam:* F. Kasryno, E. Pasandaran, A.M. Fagi (Penyunting). Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.

36. Rusastra, I W. dan **T. Sudaryanto**. 2000. Perspektif Pengembangan Sistem Usahatani (SUT) Ramah Lingkungan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Dalam*: E.Basuno, dkk (Penyunting). Prosiding Seminar Pengembangan Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan, Denpasar, 8-9 Maret 2000. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
37. **Sudaryanto, T.**, I W. Rusastra. 2000. Kebijaksanaan Strategi dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berwawasan Agribisnis. *Dalam*: S.P. Hardjono, M.C. Machfud, M.A. Yusron (Penyunting). 2000. Prosiding Seminar Hasil Penelitian/ Pengkajian Teknologi Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan Berwawasan Agribisnis, Malang 8-9 Agustus 2000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
38. **Sudaryanto, T.**, Erwidodo, B. Rachman. 2000. Perspektif Pembangunan Pertanian Menuju Peningkatan Daya Saing dan Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Wilayah Pedesaan. *Dalam*: I W. Rusastra, A.R. Nurmanaf, S.H. Susilowati, E, Jamal, B. Sayaka (Penyunting). Prosiding Seminar Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
39. **Sudaryanto, T.**, I W. Rusastra, E. Jamal. 2000. Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Dalam*: I W. Rusastra, A.R. Nurmanaf, S.H. Susilowati, E. Jamal, B. Sayaka (Penyunting). Prosiding Seminar Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
40. **Sudaryanto, T.**, I W. Rusastra., P. Simatupang., M. Ariani. 2000. Reorientasi Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan Pasca Krisis Ekonomi. *Dalam* A.K. Seta, M. Atmowidjojo, S.M. Atmojo, A.B. Jahari, P. B. Irawan. T. Sudaryanto (Penyunting). Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, 29 Pebruari-Maret 2000. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

41. Sjafaat, N. dan **T. Sudaryanto**. 2000. Aspek Sosial Ekonomi dalam Penentuan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian: Aplikasi Model I-O (Input-Output) dan PAM (Policy Analysis Matrix). *Dalam*: L.I. Amien, I. Las, Y. Koesmaryono. (Penyunting). Prosiding Lokakarya Pemberdayaan Potensi Regional Melalui Pendekatan Zone Agroekologi, Jambi ,4-5 Oktober 1999; Banjarmasin, 27-28 Oktober 1999, Malang, 8-9 Nopember 1999. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.
42. **Sudaryanto, T.** dan Hermanto. 1999. Kebijakan Investasi Irigasi Pompa di Indonesia. *Dalam*: Seminar Nasional Perspektif Keswadayaan Petani dalam Pengembangan Irigasi Pompa. Pusat Penelitian Sosial konomi Pertanian, Bogor.
43. **Sudaryanto, T.** dan F. Kasryno. 1999. Konsep Pengkajian dan Pengembangan Sistem Usaha Pertanian (SUP). *Dalam* M.O. Adnyana, P. Simatupang, A. Dimyati, A. Syam. Pengkajian Pengkajian SUTPA: Konsep, Keragaan Empiris dan Prospek. Monograph Series No. 19. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
44. Simatupang, P., **T. Sudaryanto**, F. Kasryno. 1999. Arah Perkembangan Sistem Usaha Pertanian Padi Memasuki Abad 21. *Dalam* M.O. Adnyana, P. Simatupang, A. Dimyati, A. Syam. Pengkajian Sutpa : Konsep, Keragaan Empiris dan Prospek. Monograph Series No. 19. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
45. Rusastra, I W. dan **T. Sudaryanto**. 1998. Dinamika Ekonomi Pedesaan dalam Perspektif Pembangunan Nasional. *Dalam* A. Suryana, I W. Rusastra, M. Rachmat, A. Purwoto (Penyunting). Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian, (Buku I). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
46. Suryana, A., **T. Sudaryanto**, S. Mardianto. 1997. Kebijakan Pembangunan Pertanian: Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

47. Taufiq, A. dan **T. Sudaryanto**. 1997. Pengaruh Penambahan K, Ca, dan Mg Terhadap Produktivitas Kacang Tanah di Tanah Alfisol. Komponen Teknologi Peningkatan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
48. Saptana dan **T. Sudaryanto**. 1997. Agroindustri Sebagai Penggerak Agribisnis Tanaman Pangan di Daerah Transmigrasi. Prosiding Industrialisasi, Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
49. Rusastra, I W. dan **T. Sudaryanto**. 1997. Dinamika Ekonomi Pedesaan dalam Perspektif Pembangunan Nasional. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
50. **Sudaryanto, T.** 1996. Konsumsi kedelai. *Dalam* B. Amang, M.H. Sawit, A. Rachman (Penyunting). Ekonomi Kedelai di Indonesia. IPB Press.
51. Hermanto, **T. Sudaryanto**, A. Purwoto. 1996. Pola Konsumsi dan Pendugaan Elastisitas Produk Peternakan. *Dalam* S. Hastiono dkk. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner, Cisarua 7-8 Nopember 1995. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor.
52. **Sudaryanto, T.** dan F. Kasryno. 1994. Modern Rice Variety Adoption and Factor Market Adjustment in Indonesia. In C.C. David and K. Otsuka (eds). Modern Rice Technology and Income Distribution in Asia. Lynne Rienner Publisher, Boulder & London, and International Rice Research Institute, Manila.
53. **Sudaryanto, T.** dan B. Hutabarat. 1993. Perkembangan Harga Komoditas Pertanian di Pasar Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Dalam* T. Sudaryanto, E. Pasandaran, A. Djauhari. Prosiding Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

54. **Sudaryanto, T.** dan P. Simatupang. 1993. Arah Pengembangan Agribisnis: Suatu Catatan Kerangka Analisis. *Dalam* T. Sudaryanto, E. Pasandaran, A. Djauhari (Penyunting). Prosiding Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
55. **Sudaryanto, T.** dan E. Pasandaran. 1993. Agribisnis dalam Perspektif: Konsepsi, Cakupan Analisis dan Rangkuman Hasil Pembahasan. *Dalam* T. Sudaryanto, E. Pasandaran, A. Djauhari (Penyunting). Prosiding Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
56. **Sudaryanto, T.** dan N. Syafa'at. 1993. Pengaruh Teknologi Baru dan Lingkungan Produksi terhadap Kesenjangan Pendapatan Antar Agroekosistem. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 10(2).
57. **Sudaryanto, T.** dan P.U.Hadi. 1993. Konsepsi dan Ruang Lingkup Agribisnis. *Dalam* T. Sudaryanto, E. Pasandaran, A. Djauhari (Penyunting). Prosiding Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
58. Purwoto, A., R. Sayuti, **T. Sudaryanto**. 1993. Prospek Pengembangan Agribisnis Pisang di Indonesia. *Dalam* T. Sudaryanto, E. Pasandaran, A. Djauhari (Penyunting). Prosiding Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
59. **Sudaryanto, T.** 1992. A Review on Banana Marketing in Indonesia. *Indonesian Agricultural Research and Development Journal* 4(3).
60. **Sudaryanto, T.** 1992. Perkembangan Harga Komoditas Pertanian di Pasar Dunia dan Refleksinya di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* XI(3).
61. Irawan, B., F. Lancon, **T. Sudaryanto**. 1992. Cultural Practices Differences and Its Impact on the Efficiency of Wetland Soybean: The Case of Japanan Village: East Java. *Jurnal Agro Ekonomi* 11(2).

62. Rusastra, I.W., Saptana, **T. Sudaryanto**. 1992. Analisa Sistem Agribisnis Jeruk di Kalimantan Selatan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 9 & 10 (2 dan 1):1-10.
63. Hadiwigeno, S., E. Pasandaran, **T. Sudaryanto**. 1992. Perekrayasaan Transformasi Struktur Perekonomian Nasional dengan Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian. Pangan III(11):72-81
64. **Sudaryanto, T.** dan S.H. Susilowati. 1991. Perkembangan Ekonomi Kakao Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi 9(1).
65. Mardiharini, M., Muchlas, M. Taufik, **T. Sudaryanto**. 1990. Studi Diagnostik Pengembangan Usahatani Kedelai di Desa Karyamukti, Kabupaten. Karawang. Jurnal Agro Ekonomi 9(1).
66. **Sudaryanto, T.** dan R. Sayuti. 1990. Analisa Permintaan Bahan Pangan dengan Pendekatan Persamaan Sistem. Ekonomi dan Keuangan Indonesia 38(2):141-159.
67. **Sudaryanto, T.**, I.W. Rusastra, D.H.A Darmawan. 1990. Sistem Komoditas Susu dan Perspektif Pengembangannya di Indonesia. Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Ekspor Non Migas. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).
68. **Sudaryanto, T.** dan A. Suryana. 1990. Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Diversifikasi Pertanian. Dalam: Diversifikasi Pertanian dalam Mempercepat Laju Pertumbuhan Nasional. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).
69. Purwoto, A. dan **T. Sudaryanto**. 1989. Pola Usahatani, Penawaran Hasil dan Permintaan Masukan Pada Usahatani Tumpangsari Padi dan Jagung di Kalimantan Selatan. Prosiding Patanas, Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

70. **Sudaryanto, T.** 1989. Perubahan Teknologi dan Keseragaman Tingkat Upah Antar Daerah. 1989. *Jurnal Agro Ekonomi* 8(1):37-49.
71. **Sudaryanto, T.** 1989. Teknologi, Produktivitas dan Respon Petani Padi Terhadap Harga di Kalimantan Selatan. Dalam: *Prosiding Patanas, Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
72. **Sudaryanto, T., E. Pasandaran.** 1989. *Metoda Penarikan Contoh dan Rangkuman Hasil Penelitian*. *Prosiding Patanas, Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
73. **Sudaryanto, T.** 1988. World Sugar Situation: The Seemingly Changes on Comparative Advantage. *Indonesian Agricultural Research and Development Journal*.
74. **Sudaryanto, T.** 1988. Penggabungan Data Penampang Lintang dan Deret Waktu dalam Model Regresi. *Jurnal Agro Ekonomi* 7(2).
75. Santoso, B., A. Suryana, **T. Sudaryanto.** 1983. Analisa Permintaan Pupuk Urea dan TSP di Tingkat Petani pada Usahatani Jagung. *Jurnal Agro Ekonomi* 3 (1):1-18.
76. **Sudaryanto, T., H. P. Saliem, S. Pasaribu.** 1982. Tingkat Pencurahan Kerja Rumah Tangga di Pedesaan: Studi Kasus di Empat Desa Kabupaten Kudus dan Klaten, Jawa Tengah. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 1(2):1-7.
77. **Sudaryanto, T., Hermanto, M. Syukur.** 1982. Perubahan Struktur Angkatan Kerja dan Perkembangan Tingkat Upah Buruh Tani. (Laporan Penelitian). Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
78. **Sudaryanto, T.** 1981. Evaluasi Ekonomik Terhadap Usaha Pemanfaatan Air Tanah Dalam Usahatani: Studi Kasus di Daerah Kediri-Nganjuk, Jawa Timur. *Jurnal Agro Ekonomi*, 1(1):23-36.

DAFTAR TULISAN DI MAJALAH DAN MEDIA LAIN

1. **Sudaryanto, T.** dan E. Jamal. 2006. Kurangi Makan Nasi. *Investor Daily*, 2 Nopember 2006.
2. **Sudaryanto, T.** dan A. Munif. 2006. Pelaksanaan Revitalisasi Pertanian. *Agrimedia*, 10(2), Desember 2006.
3. Pasaribu, S.M. dan **T. Sudaryanto**. 1994. Kinerja dan Prospek Agribisnis Apel Pasca Deregulasi Perdagangan Tahun 1991. *Info Hortikultura* 2(1). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Jakarta.
4. Hadiwigeno, S., E. Pasandaran, **T. Sudaryanto**. 1992. Perekayasaan Transformasi Struktur Perekonomian Nasional Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian. *Pangan* 11(11):72-81.

DAFTAR SEBAGAI PEMBICARA/ KEYNOTE SPEAKER

1. **Sudaryanto, T.**, S.H. Susilowati, Sumaryanto. 2009. Increasing Trend of Small Farms in Indonesia: Causes and Consequences. Paper presented at the 111th EAAE-IAAE Seminar: Small Farms: Persistence or Declined? University of Kent, Canterbury, UK, 25-26 June, 2009.
2. **Sudaryanto, T.**, Sumaryanto. 2008. Changing Rural Household Income in Indonesia: 1995-2007. Pembicara pada the 6th Asian Association of Agricultural Economist International Conference: Asian Economy Renaissance: What Is in It for Agriculture?. Manila, Philipinnes, 28-30 August, 2008.
3. **Sudaryanto, T.**, B. Hutabarat. 2008. Perspective of Agricultural Policy Development in Indonesia: Impacts and Challenge of the New ASEAN Policies. Pembicara pada the Symposium on Prospective Agricultural Policy Development in ASEAN Countries:

- Impacts and Challenges Due to Introduction of New ASEAN Policies, 27-29 February 2008, Langkawi, Malaysia. ASEAN Secretariat in Collaboration with the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, the Government of Japan.
4. **Sudaryanto, T., D.K.S. Swastika.** 2008. Development and Policy Issues in Indonesian Rice Industry. International Rice Research Institute, Los Banos, Philipinnes, 18-19 February, 2008.
 5. **Sudaryanto, T.** 2008. Ensuring Self Sufficiency : Indonesian Food Security Policy. Pembicara pada Food Security Forum. Syah Alam, Selangor, Malaysia, 28-29 Juli, 2008. South East Asian Council for Food Security and Fair Trade (SEACON).
 6. **Sudaryanto, T. dan A. Suryana.** 2008. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pembicara pada Pra-Wydia Karya Nasional Pangan dan Gizi IX. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
 7. **Sudaryanto T., I W. Rusastra.** 2007. Generating Employment. Pembicara pada International Conference on Taking Actions for the World's Poor and Hungry People, Beijing, China, 17-19 October, 2007. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
 8. **Sudaryanto, T., R. Kustiari.** 2007. Poverty Alleviation Programs Through Agriculture in Indonesia. Pembicara pada Regional Meeting Toward a Joint Regional Agenda for the Alleviation of Poverty through Agriculture and Secondary Crop Development. Bangkok, Thailand, 21-22 November, 2007. United Nation ESCAP-CAPSA, Bogor.
 9. **Sudaryanto, T., D.K.S. Swastika, B. Sayaka, S. Bahri.** 2006. Financial and Economic Profitability of Rice Farming Across Production Environments in Indonesia. Pembicara pada the 26th International Rice Research Conference: Science, Technology, and Trade for Peace and Prosperity, 9-12 October 2006, New Delhi, India. International Rice Research Institute, Indian Council of Agricultural Research, and National Academy of Agricultural Sciences, Government of India.

10. **Sudaryanto, T.** dan T. Pranadji. 2006. Transformasi Kelembagaan untuk Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian pada Masyarakat Papua. Pembicara pada Seminar Nasional: Sumber Energi Baru dan Alternatif Sebagai Solusi Strategis Mendukung Otonomi Daerah, 24-25 Juli 2006, Jayapura, Papua. Kerjasama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua.
11. **Sudaryanto, T.**, P. Simatupang, B. Irawan, dan D.K.S. Swastika. 2001. Medium and Longterm Prospects of Rice Supply and Demand in Indonesia. Pembicara pada the International Workshop on Medium and Longterm Prospects of Rice Supply and Demand in the 21st Century, 3-5 December 2001, International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines.
12. **Sudaryanto, T.** dan I W. Rusastra. 2000. Kebijakan Strategi dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berwawasan Agribisnis. Pembicara pada Seminal Hasil Penelitian/Pengkajian Teknologi Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan Berwawasan Agribisnis, Malang 8-9 Agustus 2000. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso, Jawa Timur.
13. **Sudaryanto, T.**, Erwidodo, dan B. Rachman. 2000. Perspektif Pembangunan Pertanian Menuju Peningkatan Daya Saing dan Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Wilayah Pedesaan. Pembicara pada Seminar Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
14. **Sudaryanto, T.**, I W. Rusastra, dan E. Jamal. 2000. Kebijakan Strategi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Mendukung Otonomi Daerah. Pembicara pada Seminar Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
15. **Sudaryanto, T.**, I W. Rusastra., P. Simatupang., dan M. Ariani. 2000. Reorientasi Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan Pasca Krisis Ekonomi. Pembicara pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, 29 Pebruari-Maret 2000. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

EDITOR JURNAL/PROSIDING

- 2002 : Ketua Tim Penyunting Analisis Kebijakan: Pembangunan Pertanian Andalan Berwawasan Agribisnis, Monograph Series No.23. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- 2002 : Ketua Tim Penyunting Analisis Kebijakan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agribisnis, Monograph Series No.22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Per-tanian, Bogor.
- 2002 : Ketua Tim Penyunting Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agro Industri, Monograph Series No.21. Pusat Penelitian dan Pengem-bangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- 2000 : Anggota Tim Penyunting Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, 29 Pebruari-1 Maret 2000. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- 1999 : Ketua Tim Penyunting Analisis dan Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian Pasca Krisis Ekonomi, Monograph Series No.20. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- 1997 : Anggota Tim Penyunting Kebijakan Pembangunan Pertanian: Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif, Monograph Series No.17. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- 1997 : Ketua Tim Penyunting Prosiding: Industrialisasi, Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- 1994 : Anggota Dewan Redaksi Jurnal Agro Ekonomi, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- 1993 : Ketua Tim Penyunting Agribisnis Komoditas Hortikultura, Monograph Series No.7. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

- 1989 : Anggota Tim Penyunting Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah tangga Pedesaan, Prosiding Patanas. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- 1989-1993: Ketua Dewan Redaksi Jurnal Agro Ekonomi, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- 1987-1989: Anggota Dewan Redaksi Forum Penelitian Agro Ekonomi, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.

KEGIATAN LAIN

- 2008 - Sekarang : Anggota Tim Teknis Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu, Departemen Pekerjaan Umum
- 2006 - Sekarang : Anggota Technical Commitee, UNESCAP-CAPSA, Bogor.
- 2005 - Sekarang : Anggota Satuan Tugas (Satgas) G33, Departemen Perdagangan.
- 2000-Sekarang : Anggota Delegasi RI dalam berbagai forum pertemuan WTO, FAO, ASEAN maupun kerjasama bilateral Indonesia dengan beberapa negara lain.
- 1990-Sekarang : Membimbing Penulisan Tesis/Disertasi atau Penguji Luar Komisi Mahasiswa S2 dan S3 di Sekolah Pasca Sarjana, Insitut Pertanian Bogor.
- 2004 : Koordinator Tim Penyusun Rencana Pembangunan Pertanian 2005-2009, Departemen Pertanian.
- 2002 : Koordinator Tim Penyusun Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan (PROKSI MANTAP), Direktorat Jenderal Produksi Tanaman Pangan.
- 1984-sekarang : Anggota International Agricultural Economic Association
- 1987-Sekarang : Anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).

- 1991/92-1993/94 : Pengajar Ekonomi Kesejahteraan dan Kebijakan Masyarakat, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- 1990/1991 : Pengajar Ekonomi Pembangunan, Universitas Nusa Bangsa, Bogor.
- 1988/1989 : Pengajar Ekonomi Publik dan Hukum Ekonomi, Universitas Nusa Bangsa, Bogor.
- 1987/1988 : Pengajar Statistika dan Pengantar Ekonomi Makro, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- 1986/1987 : Pengajar Matematika Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Jakarta.
- 1979 : Pengajar Mata Kuliah Tataniaga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- 1978 : Pengajar Mata Kuliah Ekonomi Umum, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tahlim Sudaryanto dilahirkan di Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 20 Nopember 1954 dari pasangan Ibu Ukasih dan Bapak I.Nawita (alm). Setelah lulus Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) tahun 1973 di Tanjungsari, Sumedang, kemudian melanjutkan ke program S1 di Fakultas Pertanian, IPB, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, dan selesai tahun 1978. Pada tahun 1980 menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) IPB bidang keahlian Ekonomi Pertanian, sedangkan jenjang pendidikan S3 (Ph.D) bidang Ekonomi diperoleh dari North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, U.S.A. tahun 1987. Pelatihan jangka pendek dan penjenjangan yang pernah diikuti antara lain tentang Economics Training for Agricultural Research di International Rice Research Institute (IRRI) tahun 1981, SPADYA Angkatan LI tahun 1994 dan SPAMEN tahun 1998. Menikah dengan Kartini tahun 1982 dan telah dikaruniai dua orang putri, Karlina Sari dan Melinda Sari.

Penulis mulai bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Agro Ekonomi (kini Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jabatan fungsional peneliti dimulai sebagai Ajun Peneliti Madya (1989), Peneliti Madya (1991), Ahli Peneliti Muda (1993) dan mencapai jenjang Ahli Peneliti Utama (1996) dalam bidang Sosial Ekonomi Pertanian. Selain bertugas sebagai peneliti, penulis pernah menjabat Ketua Kelompok Peneliti Agribisnis (1991-1994). Selama berkarir sebagai peneliti telah menghasilkan lebih dari 100 karya tulis yang diterbitkan pada berbagai media publikasi ilmiah, bagian dari buku, prosiding, majalah, dan surat kabar. Berkat kiprahnya dalam berbagai kegiatan penelitian, pada tahun 1997 penulis memperoleh penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI.

Karir jabatan struktural dimulai sebagai Kepala Sub-Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data (1981-1983) di Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Kepala Bidang Pelayanan Penelitian (1994-1997) di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Sekretaris Badan Litbang Pertanian (1997-1998), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (1998-2002), Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2002-2004), Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Departemen Pertanian (2004-2005) dan Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (2005-sekarang).

ISBN: 978-602-8218-31-3

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian

Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
www.litbang.deptan.go.id